



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Ekonomi Informal di Indonesia: **Ukuran, Komposisi dan Evolusi**



DEKADE
KERJA LAYAK
ASIA 2006
2015

Ekonomi Informal di Indonesia:

Ukuran, Komposisi dan Evolusi

Suahasil Nazara*

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2010
Edisi Bahasa Indonesia, cetakan pertama, 2010

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

Organisasi Perburuhan Internasional
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2010

ISBN 978-92-2-823949-2 (print)
978-92-2-823950-8 (web pdf)

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: *"The Informal economy in Indonesia. Size, composition and evolution"* ISBN: 978-92-2-123949-9 (print) ; 978-92-2-123950-5 (web pdf) /International Labour Office, Geneva 2010

Katalog Data Publikasi ILO

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns; www.ilo.org/jakarta

Dicetak di Indonesia
Editor: Taufik Muhamad

Kata Pengantar

STUDI tentang audit statistik ekonomi informal ini, merupakan bagian dari upaya untuk mengklarifikasi tantangan terkait atas data dan statistik yang dihadapi dalam mengukur dan memonitor ukuran dan tren perekonomian informal di Indonesia. Makalah ini memberikan panduan yang berguna untuk memonitor proses implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 terkait dengan perekonomian informal.

Naskah lebih awal dari studi ini telah didiskusikan dalam sebuah seminar pada Desember 2009, yang dihadiri wakil-wakil pemerintah, pekerja dan pengusaha, LSM dan universitas yang secara aktif mengambil bagian dalam memberikan masukan-masukan. Makalah ini memperoleh manfaat dari pandangan dan isu-isu kebijakan yang diekspresikan selama seminar. Departemen Kebijakan Ketenagakerjaan, Sektor Lapangan Kerja, ILO bersama ILO Jakarta memberikan dukungan teknis dan implementasi studi ini.

Makalah ini menyoroti kebalikan tren dalam porsi ekonomi informal sejak krisis keuangan Asia tahun 1997/98: dari menurun menjadi meningkat secara gradual. Periode pasca krisis, Indonesia telah dicirikan dengan proses industrialisasi dengan kontribusi tumbuhnya kembali perekonomian ekonomi.

Makalah ini mengambil beberapa sumber statistik yang tersedia di Indonesia yang telah digunakan untuk mengukur dan menganalisis perekonomian informal di Indonesia, termasuk sumber utama BPS, survey angkatan Kerja (Sakernas), Survei sosial ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Ekonomi, Survey Usaha Terintegrasi (SUSI) dan Survei Sektor Informal (SSI). Makalah ini pun mengklarifikasi definisi nasional atas perekonomian informal dan apa yang dapat diukur dengan menggunakan data survei tersebut, bagaimana mereka menangkap aspek-aspek dari fitur yang beragam dari ekonomi informal.

Dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dari perspektif pekerja informal, studi ini mengungkapkan isu yang paling penting yaitu jangkauan informal ekonomi dalam program jaminan sosial. Dalam hal ini, implementasi penuh dari dua kluster pertama program penanggulangan kemiskinan dewasa ini (Kepres 13/2009) tentang bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga miskin dan program pemberdayaan komunitas menjadi hal yang esensial.

Jakarta, 28 September 2010

Azita Berar Awad

Director Employment Policy department
ILO Geneva

Peter van Rooij

Direktur
ILO Jakarta

1. Latar Belakang

BELAKANGAN ini beberapa kajian empiris mampu menunjukkan fakta penting untuk kembali mempertimbangkan peran ekonomi informal dalam proses pembangunan. Setidaknya ada sejumlah pertanyaan penting yang bisa diurai dari perekonomian informal ini: apakah keberadaan ekonomi informal merupakan sumber keprihatinan atau justru merupakan cara lain untuk menciptakan lapangan kerja dalam sebuah perekonomian yang sedang berkembang; apakah ekonomi informal didorong oleh tekanan, pilihan, atau tekanan dan pilihan; termasuk sejauh mana pekerja ekonomi informal terkena dampak krisis keuangan dan ekonomi global? Merancang kebijakan dan struktur kelembagaan yang sesuai untuk menghadapi ekonomi informal tentunya sangat bergantung pada sejumlah respons terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tadi.

Debat kebijakan di Indonesia yang terkait dengan keberadaan ekonomi informal umumnya dilihat sebagai sumber keprihatinan, sebagai keadaan setengah menganggur dan kemiskinan. Ekonomi informal muncul dari tren belakangan ini dan proyeksi dari sebuah proses yang disebut “de-industrialisasi” (lihat Basri, 2009). Sebelum krisis keuangan 1997, perekonomian Indonesia yang sedang tumbuh dengan cepat mengalami sebuah proses yang lazim dari transformasi struktural dengan penurunan pangsa pekerjaan yang stabil dalam sektor pertanian dan ekonomi informal. Masih belum dapat dipastikan apakah dampak dari krisis saat ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi informal menjadi lebih banyak dalam jangka menengah. Masalah penting lain yang harus diperhatikan di masa mendatang adalah liberalisasi perdagangan, dalam wujud pembentukan Area Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (*Southeast Asian Nations/ASEAN*) serta FTA, antara ASEAN dan mitra perdagangan utama seperti Cina.

Informalitas dalam ekonomi merupakan akibat dari peraturan pasar tenaga kerja yang menuntut perlindungan terhadap upah dan kondisi kerja pekerja sektor formal yang lebih tinggi. Adanya peraturan pasar tenaga kerja yang kaku, membuat pengusaha menghindari rekrutmen permanen dan oleh karenanya mendorong informalitas. Di saat bersamaan, pencari kerja akhirnya mencari pelarian ke sektor ekonomi informal saat mereka di hadapkan pada antrean panjang untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal yang dianggap lebih menguntungkan. Dalam kerangka kerja ini, formalisasi ekonomi Indonesia membutuhkan cukup banyak deregulasi.

Di sisi lain, informalitas juga mungkin muncul karena pertumbuhan yang tidak memadai serta ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Pertumbuhan adalah penyebab munculnya pekerjaan dalam sektor ekonomi formal. Ketika pertumbuhan tersebut tidak memadai, maka tidak tersedia cukup pekerjaan terutama di ekonomi informal. Ketidaksetaraan yang semakin meningkat juga menghalangi terciptanya pekerjaan dalam sektor ekonomi formal. Yang terakhir ini tentunya juga memerlukan sejumlah modal di atas batas ambang tertentu.

Namun, sayangnya wacana kebijakan saat ini tidak didukung oleh analisis empiris secara teliti. Misalnya, seberapa kuat sumber data resmi dalam mendokumentasikan evolusi dari ekonomi informal; apakah ekonomi informal merupakan sumber utama dari keadaan setengah pengangguran dan kemiskinan; apakah informalitas sebagian besar merupakan sebuah produk dari regulasi pasar tenaga kerja yang berat, yang apabila dikurangi akan membangkitkan kembali formalisasi ekonomi, termasuk apabila peluang kerja di sektor formal berkurang, baik sementara maupun permanen, bagaimana reaksi pekerja terkait dengan kegiatan dalam sektor ekonomi informal atau haruskah keluar dari pasar tenaga kerja?

Makalah ini memberikan profil statistik mengenai ekonomi informal di Indonesia. Makalah dimulai dengan sebuah diskusi mengenai konsep dan definisi ekonomi informal dan terminologi pekerja informal yang umum digunakan. Setelah itu, makalah menjelaskan berbagai jenis survei yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi besaran ekonomi informal. Bagian akhir secara singkat mencerminkan permasalahan kebijakan yang menggunakan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) sebagai kerangka kerja.

2. Konsep dan Definisi

ORGANISASI Perburuhan Internasional (ILO) adalah salah satu pelopor konsep “sektor informal”, berkaca dari pengalaman Afrika yang didokumentasikan dalam sebuah kajian pada tahun 1972. Fokusnya terletak pada dualisme dalam pasar tenaga kerja di daerah perkotaan yang melihat bahwa sektor berproduktivitas rendah, tidak diregulasi dan sangat banyak muncul berdampingan dengan sektor formal, yang terdiri dari usaha terdaftar dan sektor publik. Konsep dualisme pasar kerja adalah pengaruh intelektual dari perspektif berbeda, seperti pemikiran dualisme dalam proses pembangunan. Di satu sisi, kerangka kerja Lewisian menjelaskan bahwa dualisme bersifat sementara (transisi) dan pada pokoknya adalah sebuah fenomena pedesaan. Kerangka kerja ini menawarkan sebuah prediksi yang optimis. Kondisi tenaga kerja yang “berlebihan” di daerah pedesaan akan berkurang melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, dualisme ekonomi akan mengalami sebuah penurunan sekuler. Di sisi lain, pandangan Harris-Todaro menyatakan bahwa dualisme ekonomi pada dasarnya adalah fenomena perkotaan dan dapat berlangsung lama. Dalam pandangan ini, sektor informal yang berproduktivitas dan berupah rendah menjadi “ruang tunggu” untuk pekerja desa-kota di saat mereka juga mengantre untuk masuk ke pekerjaan sektor formal yang menguntungkan. Selama prospek pekerjaan tersebut masuk akal, antrean pencari kerja akan terus ada.

Meninjau kembali kerangka kerja Harris-Todaro yang terkenal, kerangka tersebut sangat bergantung pada pemikiran bahwa upah riil dalam sektor formal bersifat kaku dan ditentukan secara eksogen [kemungkinan mencerminkan hambatan regulasi]. Ketika upah bersifat kaku ke bawah diduga berlaku, kesenjangan upah antara sektor formal dan informal dianggap cukup besar untuk menahan migrasi desa-kota yang cukup tinggi. Pesan kebijakan berfokus pada pengembangan pedesaan sebagai cara untuk mengurangi tingkat migrasi dari desa-kota sehingga sektor formal berbasis kota dapat secara produktif menyerap arus pencari kerja.

Pandangan mengenai sektor informal telah berkembang seiring dengan waktu. Kini sektor informal tidak hanya dilihat sebagai sebuah “ruang tunggu” untuk pekerja migran dari desa-kota yang mengantre untuk mendapatkan pekerjaan sektor formal. Memang, istilah ini kerap dianggap membatasi karena hanya terfokus pada segmentasi pasar tenaga kerja di daerah perkotaan. ILO lebih memilih untuk menggunakan istilah “ekonomi informal”, sebuah kategori hibrid yang terfokus pada usaha dan status pekerjaan. Dengan kata lain, usaha kecil dan mikro—yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar—merupakan bagian dari kegiatan yang meliputi ekonomi informal, begitu juga dengan pekerjaan di sektor formal yang berada di luar area regulasi formal. Hal ini berarti ekonomi formal dapat bersifat lintas desa dan kota serta lintas sektor kegiatan. Tidak seperti literatur terdahulu, genre yang ada sekarang tidak menganggap ekonomi informal sebagai sebuah entitas monolitik yang didominasi oleh masyarakat miskin yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dengan produktivitas rendah.

Sebuah konsep kerja diperlukan guna memahami ekonomi informal secara lebih menyeluruh. Ukuran, komposisi dan evolusi ekonomi informal, seiring waktu sangat penting untuk dipahami. Penting juga untuk mengakui bahwa ekonomi informal bukanlah sektor yang berdiri sendiri. Ekonomi informal memiliki interaksi yang cukup besar dengan kegiatan-kegiatan formal. Berbagai definisi yang berbeda telah dikaji. Untuk ulasannya, lihat Blunch dkk (2001).

Sebuah kerangka kerja untuk mengoperasionalisasi konsep dapat dilihat pada Tabel 1, yang diambil dari GTZ dan Bappenas (2008). Tabel itu menunjukkan, banyak aspek dalam sektor informal seperti legalitas, alasan untuk beroperasi secara informal, status pekerjaan, fenomena informalitas, hubungannya dengan kegiatan formal, sektor-sektor kegiatan informal, teknologi yang digunakan, penghasilan dan kemiskinan serta kontribusi sektor informal terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan politik telah bergeser secara bertahap dari pandangan yang bersifat tradisional ke modern.

Sektor informal ternyata juga memiliki spektrum yang sangat luas. Sektor ini dapat dilihat dari aspek legalitas, status kerja, teknologi yang digunakan, penghasilan dan produktivitas, bahkan kontribusi politik. Lihat juga Chowdury dan Ullah (2005).

Tabel 1. Kerangka Sektor Informal (SI)

Aspek, bersama dengan perspektif yang berbeda seiring waktu	Pandangan tradisional	Pandangan modern
Legalitas	Ciri-ciri individu-individu SI adalah beroperasi seluruhnya secara ilegal.	Individu-individu SI dicirikan beroperasi dalam sebuah ruang antara legalitas dan ilegalitas, mematuhi beberapa aturan namun tidak dengan aturan lainnya.
Alasan beroperasi secara informal	Partisipasi SI adalah secara kebetulan, akibat hambatan-hambatan yang sangat berat secara internal, eksternal dan antar-perusahaan.	Partisipasi SI adalah secara kebetulan, pilihan sendiri maupun akibat irelevansi. Motifnya termasuk fleksibilitas pasar tenaga kerja, keberadaan peluang yang menguntungkan, tidak patuh terhadap peraturan meski ada kemungkinan untuk patuh.
Status pekerjaan	Terutama pengusaha kecil dan mikro (perusahaan, wirausahawan, dan anggota keluarga yang diupah), mengelola usaha yang tidak diregulasi atau ilegal dan tidak terdaftar.	SI meliputi semua jenis status pekerjaan, termasuk pekerjaan non-upah dan yang diupah serta pekerjaan di sektor informal dan pekerjaan informal di sektor formal.
Fenomena jangka pendek atau jangka panjang dan hubungan dengan sektor formal	SI dianggap sebagai sektor tradisional dan transisi, terpisah dari perekonomian formal; sebuah fenomena dari kurangnya pembangunan.	SI dianggap sebagai bagian dari perekonomian, fenomena yang berlanjut bahkan berekspansi, eksis bersebelahan dengan dan bahkan saling terhubung secara berbeda (lebih rendah atau lebih tinggi) dengan sektor formal.
Kegiatan ekonomi dan sektor-sektor yang terlibat	SI terutama terdiri dari pedagang jalanan dan produsen berskala kecil; fenomena perkotaan yang khas.	SI terdiri dari beragam kegiatan ekonomi mulai dari pekerja musiman di sektor konstruksi dan pertanian hingga pekerja subkontrak rumahan di industri teknologi tinggi; fenomena perkotaan serta pedesaan.
Basis teknologi	Produksi SI kurang lebih statis; penggunaan teknologi tradisional dan strategi meniru yang lain.	Mempertimbangkan bahwa beberapa segmen SI mungkin sangat dinamis dan inovatif (proses, input, dan output); mampu beradaptasi ke ceruk pasar yang baru.

Basis teknologi	Produksi SI kurang lebih statis; penggunaan teknologi tradisional dan strategi meniru yang lain.	Mempertimbangkan bahwa beberapa segmen SI mungkin sangat dinamis dan inovatif (proses, input, dan output); mampu beradaptasi ke ceruk pasar yang baru.
Pendapatan dan kemiskinan	Pendapatan cenderung sangat rendah; kemiskinan adalah kuncinya.	Kemiskinan seringkali cukup berpengaruh, besarnya pendapatan bervariasi dan secara sistemik menurut status pekerjaan, dengan wirausahawan/pemilik usaha mikro memiliki pendapatan terbesar, diikuti oleh pekerja dengan upah tetap, pekerja musiman, dan pekerja magang.

Sumber: GTZ dan Bappenas (2008) hal. 89-90

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003, pekerja informal mengacu pada orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai semua bisnis komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumber daya lokal.

BPS telah lama mengajukan pertanyaan mengenai status kerja. Menurut statusnya, pekerja dikategorikan menjadi tujuh:

- 1) Berusaha sendiri.
- 2) Berusaha sendiri dengan bantuan keluarga atau anggota keluarga dengan tidak dibayar.
- 3) Pengusaha dengan pekerja tetap atau pekerja diupah.
- 4) Karyawan/staf/pekerja.
- 5) Pekerja musiman di bidang pertanian.
- 6) Pekerja musiman di bidang non-pertanian.
- 7) Pekerja tidak dibayar.

Kategori 3 dan 4 umumnya mengacu pada pekerja di sektor formal, sementara kategori lainnya adalah sektor informal. Kategorisasi ini mudah dilakukan. BPS Indonesia telah mengeluarkan data ini secara konsisten, sehingga kita dapat menelusuri kembali perkembangan sektor informal di Indonesia. Kategori 5 dan 6 baru diperkenalkan sejak tahun 2001. Pekerja musiman (*casual worker*) di bidang pertanian/non pertanian adalah orang yang bekerja dengan risiko sendiri tanpa bantuan dari anggota keluarganya atau karyawan di sektor pertanian/non pertanian. Sebelum tahun 2001, pekerja lepas di pertanian dikategorikan sebagai karyawan, sementara pekerja lepas di bidang non pertanian dikategorikan sebagai pekerja berusaha sendiri.

Namun, kategorisasi dari ekonomi formal berdasarkan status 3 dan 4 terlalu sederhana. Pertimbangkan situasi berikut. Banyak cerita beredar tentang kegiatan seorang bos pemulung—yang melaksanakan beberapa pekerjaan administratif, manajerial bahkan sejumlah pekerjaan profesional—kemungkinan mendapatkan imbalan finansial cukup banyak. Terkait dengan itu, pemulung yang sebenarnya pergi dari satu rumah ke rumah lain dapat dikategorikan sebagai pekerja informal, namun bos yang menjalankan

bisnis pemulung ini dapat dikategorikan sebagai formal. Bos tersebut menjalankan pekerjaan profesional atau manajerial. Fenomena ini banyak ditemukan di kota-kota besar di seluruh dunia. Di sisi lain, terdapat juga kasus-kasus di mana semakin banyak pekerja yang berusaha sendiri dapat dikategorikan sebagai seorang profesional. Seorang programmer komputer dapat dikategorikan sebagai pekerja formal, walaupun orang tersebut mungkin saja bekerja sendiri atau dibantu oleh pekerja sementara.

Oleh karena itu penting untuk memeriksa, tidak hanya status pekerjaan, namun juga tipe pekerjaan. BPS telah menetapkan 10 kategori mengenai tipe pekerjaan ini, antara lain:

- 1) Pekerja profesional, teknik, dan pekerja terkait lainnya.
- 2) Pekerja administrasi dan manajerial.
- 3) Pekerja juru tulis dan terkait.
- 4) Pekerja bidang penjualan.
- 5) Pekerja bidang jasa.
- 6) Pekerja pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu.
- 7) Pekerja produksi dan terkait.
- 8) Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan.
- 9) Buruh.
- 10) Lain-lain.

Tabel 2. Aktivitas Informal

Jenis pekerjaan umum	Status pekerjaan						
	Pekerja berusaha sendiri	Berusaha sendiri dibantu oleh pekerja sementara/ tidak dibayar	Berusaha sendiri dibantu oleh pekerja permanen /dibayar	Karyawan/ pekerja	Pekerja musiman di bidang pertanian	Pekerja musiman di bidang non-pertanian	Pekerja tidak dibayar
Pekerja profesional, teknik, dan pekerja terkait lainnya	F	F	F	F	F	F	INF
Pekerja administrasi dan manajerial	F	F	F	F	F	F	INF
Pekerja juru tulis dan terkait	F	F	F	F	F	F	INF
Pekerja bidang penjualan	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Pekerja bdg jasa	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu	INF	INF	F	F	INF	INF	INF
Pekerja produksi dan terkait	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Operator peralatan pengangkutan	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Buruh	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Lain-lain	INF	F	F	F	INF	INF	INF

Catatan: F: Formal, INF: Informal
Sumber: BPS, 2009, hal. xxx (urutan diubah)

Selanjutnya, BPS (2009) menyatakan bahwa “kegiatan informal mengacu pada kegiatan ekonomi yang umumnya dilakukan secara tradisional oleh organisasi bertingkat rendah ataupun yang tidak memiliki struktur, tidak ada akun transaksi (*transaction accounts*) dan ketika terdapat relasi kerja biasanya bersifat musiman (*casual*), pertemanan atau relasi personal, ketimbang berbasis perjanjian kontrak. Dalam publikasi ini, kegiatan informal ditarik dari tabulasi silang dua variabel: “status pekerjaan dan pekerjaan utama” (BPS 2009, hal. xxix, penekanan pada keaslian). Tabulasi silang dihasilkan ulang sebagai berikut.

Definisi di atas secara lebih tepat menjelaskan ekonomi informal dari sudut pandang ketenagakerjaan. Definisi ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar:

- Semua pekerja kategori status 7 (pekerja tidak dibayar) adalah informal.
- Pekerja dalam kategori status 3 (pengusaha dengan pekerja tetap/pekerja dibayar) dan kategori status 4 (karyawan/staf/pekerja) adalah formal.
- Pekerja di kategori 1 (profesional), 2 (administratif), dan 3 (tata usaha) semua adalah pekerja formal, kecuali pekerja yang tidak dibayar.
- Semua pekerja musiman (*casual*) dan pekerja dengan usaha sendiri adalah informal, kecuali mereka di kategori 1 (profesional), 2 (administratif), dan 3 (tata usaha).
- Semua pekerja dalam kategori 2 (pengusaha dibantu oleh pekerja sementara/ tidak dibayar) adalah formal kecuali mereka yang berada di kategori 6 (pertanian, peternakan, pekerja kehutanan, nelayan dan pemburu), dan tipe 10 (lain-lain).

Terkait dengan Tabel 2 di atas, Chen (2007) memberikan sudut pandang yang menarik terkait dengan segmentasi ekonomi informal. Ekonomi informal terdiri dari berbagai lapisan dan segmen yang dapat memengaruhi pendapatan dalam sektor tersebut. Di bagian paling bawah piramida adalah *outworker* (pekerja lepas) industrial atau pekerja rumahan, dan pekerja lepas diupah. Mereka sering dikontrak oleh perusahaan dengan cara kontrak (*outsourcing*). Di atas kategori-kategori itu adalah operator yang berusaha sendiri. Di piramida atas adalah karyawan informal dan pengusaha informal.

Gambar 1. Segmentasi ekonomi informal



Segmentasi ekonomi informal juga mewakili tingkat penghasilan yang diperoleh. Pekerja lepas berada dalam posisi paling terakhir dalam hal penghasilan, sementara pengusaha informal pada posisi tertinggi. Segmentasi ini juga memiliki dimensi gender. Perempuan menguasai informalitas di segmen bawah, sementara laki-laki mendominasi segmen atas.

3. Survei dan Data

SEBAGAI tambahan dari definisi tersebut, data diperlukan untuk dapat mengukur dan mengidentifikasi ciri-ciri sektor informal. Di Indonesia, data resmi mengenai angkatan kerja yang mencakup kegiatan informal dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan definisi sendiri terhadap ekonomi informal, bergantung pada sumber daya, baik sensus atau survei. Dalam sub-bagian ini, penjelasan tiap sensus dan survei terkait dengan ekonomi informal akan diuraikan.

3.1. Data Resmi mengenai Isu-isu Tenaga Kerja

Dalam mengumpulkan data tenaga kerja, BPS menggunakan dua pendekatan berbeda yaitu usaha dan rumah tangga. Kedua pendekatan ini diharapkan mampu mencakup sisi penawaran dan permintaan dari tenaga kerja. Untuk mengumpulkan data berbasis usaha sampai ke tingkat desa, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi sejak tahun 1986, dan sensus terakhir dilaksanakan pada 2006. Di sisi lain, untuk mengumpulkan data berbasis rumah tangga mengenai angkatan kerja, BPS menyelenggarakan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), Survei Angkatan Kerja Nasional, yang dimulai sejak tahun 2005 dan diselenggarakan dua kali dalam satu tahun.

Sensus Ekonomi

Sensus Ekonomi dilakukan setiap sepuluh tahun sekali dimulai sejak tahun 1986. Dalam sensus ini, semua bisnis yang terdaftar, dihitung. Namun, metode ini membuat banyak bisnis atau usaha yang tidak terdaftar tidak masuk ke dalam sampel. Perbaikan dilakukan pada Sensus Ekonomi kedua di tahun 1996 yang memasukkan bisnis non-direktori dalam proses pendaftaran. Sensus Ekonomi terakhir dilakukan pada tahun 2006 dan tahapan kedua dilakukan pada tahun 2007-2008 untuk mendata baik usaha kecil, menengah dan besar, serta mengumpulkan data yang lebih rinci mengenai usaha-usaha yang menjadi sampel.

Tabel 3. Perbandingan Konsep Tenaga Kerja dalam Sensus Ekonomi 2006 dan Sakernas

No	Deskripsi	Sensus Ekonomi 2006	Sakernas
1	Usia tenaga kerja	Kelompok tenaga kerja berusia < 15 dan 15 tahun.	Penduduk berusia 15 tahun.
2	Bekerja	Terdaftar sebagai pekerja dalam sebuah bisnis yang disensus.	Bekerja minggu lalu setidaknya selama 1 jam berikutnya.
3	Lama jam kerja	Semua waktu yang dialokasikan untuk bisnis, kecuali waktu rehat, sejak mulai bekerja sampai tutup.	Semua waktu kerja yang digunakan, kecuali waktu rehat dan hal-hal di luar kerja.
4	Unit enumerasi	Sensus pintu ke pintu dan metode bola salju ke pemilik atau orang yang bertanggungjawab dalam bisnis tersebut.	Survei ke rumah tangga sebagai responden.
5	Pekerja keluarga	Pekerja (keluarga) tidak dibayar, bekerja kurang dari 1/3 waktu kerja standar dalam bisnis tersebut tidak dikategorikan sebagai pekerja.	Dikategorikan sebagai pekerja.
6	Cakupan sektor	Tidak termasuk pertanian (kategorisasi A dan B) dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan asuransi sosial wajib (kategori L).	Semua sektor di ranah bisnis.
7	Status pekerjaan	Pekerja dibayar, pekerja tidak dibayar, pemilik dan pekerja keluarga	1) Berusaha sendiri, 2) Mandiri dengan bantuan dari anggota keluarga, 3) Pengusaha dengan pekerja tetap/pekerja diupah, 4) Karyawan/staf/pekerja, 5) Pekerja musiman di bidang pertanian, 6) Pekerja musiman di bidang non pertanian, 7) Pekerja tidak dibayar.

Sumber: BPS (2009) hal. 7

Dalam sensus tersebut, metode dari pintu ke pintu digunakan untuk mendaftar semua usaha di Indonesia yang mencakup semua sektor industri kecuali pertanian. Selain itu, metode bola salju digunakan di daerah di mana tidak ada pemusatan bisnis. Dua tipe kuesioner yang berbeda digunakan dalam pendaftaran usaha, satu untuk mencakup usaha di tempat permanen dan satu lagi untuk mencakup tempat non-permanen atau semi-permanen. Hal ini dapat digunakan sebagai sebuah indikator apakah sebuah usaha itu formal atau informal. Selain itu, sensus juga mengumpulkan data mengenai apakah sebuah usaha memiliki izin bisnis atau bentuk izin lainnya. Data mengenai status pekerja juga dikumpulkan dengan mencakup apakah seorang pekerja dibayar atau tidak dibayar.

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam Sensus Ekonomi berbeda dari yang digunakan dalam Sakernas. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Sejak Sakernas diprakarsai pada tahun 1976, ukuran sampel, cakupan regional dan kerangka waktunya telah sering mengalami modifikasi. Dari tahun 1986 sampai 1993, Sakernas diselenggarakan tiap tiga bulan dengan sistem rotasi sehingga beberapa rumah tangga dikunjungi kembali di triwulan berikutnya, dan sejak tahun 1994, Sakernas dilaksanakan tiap tahun dengan menggunakan sampling sistematis. Dari tahun 1986-1988, kategori pekerjaan dan pekerjaan utama merupakan sebuah pertanyaan tertutup. Namun sejak tahun 1989, pertanyaannya berubah menjadi pertanyaan terbuka. Pada tahun 1995, Susenas dilewatkan karena pada tahun itu merupakan tahun penyelenggaraan Survei Antar Sensus Penduduk (Supas).

Selama tahun 2002-2004, Sakernas diselenggarakan setiap triwulan dengan 18.000 sampel. Namun, karena indikator situasi angkatan kerja tidak terwakili secara nasional, selain juga karena hambatan waktu, Sakernas triwulan dihapus pada 2004. Sejak tahun 2005, Sakernas dilaksanakan per semester pada Februari dan Agustus dengan 67.000 sampel. Sejak Agustus 2007, Sakernas dirancang agar dapat mewakili tiap kabupaten, sementara Sakernas pada Februari dirancang mewakili kondisi angkatan kerja sampai ke tingkat provinsi.

Sakernas mengumpulkan data mengenai karakteristik individu seperti gender, usia dan latar belakang pendidikan serta situasi kerja seseorang seperti apakah masuk ke dalam angkatan kerja atau tidak, pekerjaan utamanya, status pekerjaannya, waktu kerja serta kegiatan mencari pekerjaan.

Di Sakernas, BPS menggunakan definisi yang diusulkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) seperti yang tertulis dalam *Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment*, *An ILO Manual on Concepts and Methods* (ILO, 1992).

Konsep informalitas di Sakernas didefinisikan sebagai: *kegiatan informal mengacu pada kegiatan ekonomi yang pada umumnya dilakukan secara tradisional, oleh organisasi bertingkat rendah atau tidak memiliki struktur sama sekali, tidak ada akun transaksi dan ketika relasi tenaga kerja muncul, sebagian besar sifatnya adalah pekerjaan musiman, berdasarkan pada pertemanan atau relasi personal ketimbang perjanjian kontrak.*

Di Sakernas 2009, pertanyaan mengenai pekerjaan utama bersifat terbuka dan enumerator diminta untuk mencatat jawaban dari responden sejelas mungkin. Jawaban-jawaban ini kemudian diberi kode dengan menggunakan tiga digit Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002.

Sumber Data Lain yang Dikumpulkan oleh BPS

Selain dari sumber data utama mengenai kondisi tenaga kerja seperti yang disebutkan di atas, BPS juga mengumpulkan data menggunakan Survei Usaha Terintegrasi (Susi) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Serupa dengan Sensus Ekonomi, SUSI adalah data berbasis usaha, sementara Susenas adalah survei berbasis rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah serangkaian survei sosioekonomi multitujuan berskala besar yang diprakarsai pada tahun 1963-1964 dan dilakukan kembali setiap tahun atau setiap dua tahun. Sejak 1993, survei SUSENAS mencakup sampel yang mewakili ruang lingkup nasional dan pada umumnya terdiri dari 200.000 rumah tangga. Setiap survei menyangkut satu pertanyaan inti yang terdiri dari sebuah daftar rumah tangga, meliputi jenis kelamin, usia, status pernikahan, dan tingkat pendidikan semua anggota keluarga. Survei juga dilengkapi dengan modul-modul yang mencakup sekitar 60.000 rumah

tangga yang dirotasi seiring waktu untuk mengumpulkan informasi tambahan seperti perawatan kesehatan dan nutrisi, penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, sosiobudaya, kejahatan dan pariwisata.

Kondisi angkatan kerja dikumpulkan tiap tahun dalam Susenas, karena persoalan ini tercakup dalam kuesioner inti. Beberapa pertanyaan dalam bagian angkatan kerja, serupa dengan pertanyaan dalam Sakernas. Namun, pertanyaan terkait dengan tenaga kerja di Susenas mencakup aspek-aspek yang lebih sedikit dibandingkan pertanyaan di Sakernas. Pertanyaan terkait dengan tenaga kerja di Susenas dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang berada dalam angkatan kerja atau tidak dan apabila seseorang adalah pekerja, di sektor mana ia bekerja dan status pekerjaannya, dan apabila seseorang adalah pekerja dibayar, berapa banyak gaji yang dia peroleh dari pekerjaannya itu.

Survey Usaha Terintegrasi (Susi)

Survei Usaha Terintegrasi (Susi) adalah sebuah perpanjangan dari pengumpulan data mengenai Usaha Non-Direktor/Usaha Rumah Tangga dalam Sensus Ekonomi 1996 dengan sampel yang lebih kecil. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah pekerja, output, upah dan lainnya terkait dengan industri kecil dan kerajinan tangan rumahan. Sebelum tahun 1996, ini merupakan survei terhadap industri kecil dan kerajinan tangan rumahan pada tahun 1991, 1993, 1994 dan 1995. Susi diprakarsai pada 1998 dan sejak tahun 1999, survei tersebut dilaksanakan setiap triwulan dengan sampel sebanyak 120.000 usaha non pertanian. Usaha yang terdaftar adalah usaha yang memenuhi syarat dan non-direktori, kecuali untuk industri, yakni usaha yang memiliki kurang dari 20 pekerja. Pada tahun 2005, terdapat 14.981 blok sensus di SUSI dan 207.761 usaha non-direktori yang disurvei.

Survei dilakukan dalam dua tahap. Pertama usaha terdaftar dan kemudian sampel diambil dari daftar. Khususnya untuk sektor Industri Kecil (Kode: D1), semua usaha yang terdaftar disurvei.

Kajian mengenai Dampak Krisis 1998

Pada 1999, BPS berkolaborasi dengan Bank Dunia, didanai sepenuhnya oleh Ford Foundation, melakukan sebuah kajian di tingkat kabupaten/kota mengenai dampak krisis terhadap bisnis dan ekonomi serta ketahanan rumah tangga. Dalam survei ini, usaha juga disurvei guna mengetahui dampak dari krisis finansial pada kegiatan bisnis, sementara rumah tangga disurvei agar lebih memahami strategi rumah tangga dalam menghadapi krisis.

Bagian usaha dari survei ini ditujukan untuk memahami dampak krisis terhadap usaha dan apakah usaha tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja atau tidak. Terdapat dua tipe kuesioner dalam survei usaha ini. Kuesioner pertama adalah untuk usaha besar formal dan kuesioner lainnya adalah untuk pengecer. Meskipun demikian, tidak ada indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah pengecer itu formal atau informal.

Dalam survei rumah tangga, pertanyaan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi informal di tingkat rumah tangga dimasukkan. Demografi rumah tangga dan kondisi rumah dinilai dalam sebuah modul sebagai tambahan terhadap ketahanan ekonomi dan strategi menghadapi krisis. Selain itu, tiap anggota keluarga yang berumur lebih dari 10 tahun, dicatat kegiatan ekonominya.

Pertanyaan mengenai kondisi tenaga kerja dalam survei khusus ini lebih komprehensif daripada pertanyaan dalam Sakernas. Survei ini tidak hanya menanyakan pekerjaan utama dan status pekerjaan, namun juga tempat kerja sehingga survei ini dapat mengetahui apakah seseorang terlibat dalam kegiatan informal

atau tidak. Pertanyaan mengenai tempat kerja mencakup apakah tempat kerja bersifat permanen, apakah berupa rumah, apakah kerjanya reguler, apakah ada jam kerja tetap, jumlah pekerjanya dan berapa banyak pekerja yang dibayar dan tidak dibayar.

Survei Sektor Informal (SSI)

Saat ini terdapat survei BPS yang sedang berjalan, hasil kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia, yang mengumpulkan data mengenai sektor informal dan pekerja informal di dua provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten. Tujuan survei ini adalah untuk memberikan input guna mengukur kontribusi sektor informal pada produk domestik bruto dan untuk analisis kebijakan. Pengumpulan data ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sebuah perbandingan internasional dari data mengenai ekonomi informal yaitu *Interregional Cooperation on the Measurement of Informal Sector and Informal Employment* (ICMISIE) dan juga menciptakan sebuah kumpulan data (dataset) mengenai ekonomi informal berdasarkan pada definisi nasional.

Pada dasarnya, survei ini dilampirkan dalam Sakernas sebagai sebuah Sakernas Perpanjangan dengan tiga modul tambahan: 1) Modul pekerjaan informal; 2) Modul identifikasi usaha rumah tangga tidak berbadan hukum dengan beberapa produksi pasar (*Household Unincorporated Enterprises with some Market Production/ HUEM*); dan 3) Modul usaha sektor informal.

Modul pertama akan dapat membedakan pekerja informal dari pekerja formal. Bersama dengan output dari modul ketiga, modul pertama akan memperkaya analisis karena memungkinkan untuk menentukan pekerja informal di sektor informal. Modul HUEM akan mengidentifikasi dan mendata rumah tangga HUEM yang akan disurvei pada tahap kedua. Survei tahap kedua akan difokuskan pada kegiatan produksi guna memberikan informasi mengenai kontribusi sektor informal pada PDB. Oleh karena itu, tahap pertama survei mencakup pekerja individual sementara tahap kedua adalah survei berbasis usaha.

Data mengenai pengeluaran rumah tangga juga dikumpulkan dalam tahap pertama sehingga kaitan antara kegiatan kerja dan kemiskinan dapat dianalisis.

3.2. Data Non-BPS

Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS)

Sumber data lain yang mencakup beberapa pertanyaan tentang tenaga kerja adalah Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (The Indonesia Family Life Survey/IFLS). IFLS adalah survei longitudinal pertama di Indonesia yang diadakan oleh Rand Corporation bekerjasama dengan beberapa institusi. Survei ini mengumpulkan informasi rumah tangga tentang pengeluaran, pengetahuan tentang fasilitas kesehatan, ekonomi rumah tangga, informasi orang dewasa, dan banyak lagi. Selain itu, masyarakat juga disurvei untuk memperoleh data tentang sejarah dan ciri-ciri komunitas, statistik komunitas, organisasi perempuan desa, dan sebagainya. Survei ini mewakili sekitar 83 persen dari populasi Indonesia dan mencakup lebih dari 30.000 individu yang berdomisili di 13 dari 27 provinsi di negeri ini.

IFLS gelombang pertama (IFLS1) diadakan pada tahun 1993/1994. IFLS2 dan IFLS2+ masing-masing diadakan pada tahun 1997 dan 1998, di mana IFLS2+ mencakup 25 persen sub-sampel dari rumah tangga IFLS untuk menilai secara langsung dampak dari krisis finansial Asia. IFLS3 mencakup sampel

keseluruhan, dan diadakan pada tahun 2000. Sementara survei terbaru, gelombang keempat IFLS (IFLS4), yang diadakan pada tahun 2007/2008 juga mencakup keseluruhan sampel.

Skema sampling pada gelombang pertama merupakan penentu primer dari sampel pada gelombang-gelombang berikutnya. Skema sampling IFLS1 melakukan stratifikasi pada provinsi, lalu secara acak mengambil sampel di dalam provinsi. Provinsi dipilih untuk memaksimalkan keterwakilan populasi, menangkap keberagaman budaya dan sosial-ekonomi Indonesia, serta memastikan efektivitas biaya mengingat ukuran dan susunan geografis negeri ini.

Selama IFLS1, 7.224 rumah tangga diwawancara. Selanjutnya 94 persen dari rumah tangga ini dikunjungi ulang dalam IFLS2. Selain dari rumah tangga yang diwawancara, dalam IFLS dilakukan wawancara individu. Para individu ini dijadikan sampel dari daftar setiap anggota rumah tangga.

IFLS1 melakukan wawancara terperinci dengan para anggota rumah tangga berikut:

- Kepala rumah tangga dan istri/suaminya;
- Dua anak berusia antara 0 hingga 14 tahun yang dipilih secara acak dari kepala rumah tangga dan istri/suaminya;
- Seorang individu berusia 50 tahun atau lebih dan istri/suaminya, yang dipilih secara acak dari sisa anggota keluarga; dan
- Untuk 25 persen dari rumah tangga yang dipilih secara acak, seorang individu berusia 15 hingga 49 tahun dan istri/suaminya, dipilih secara acak dari anggota keluarga sisanya.

Dalam IFLS3, tingkat kontak ulang adalah 95,3 persen dari IFLS1 rumah tangga. Memang, hampir 91 persen dari IFLS1 rumah tangga adalah panel rumah tangga lengkap, dalam wawancara di ketiga gelombang, IFLS1, 2 dan 3. Tingkat kontak ulang ini sama tingginya atau lebih tinggi dari kebanyakan survei longitudinal di Amerika Serikat dan Eropa. IFLS4 diadakan pada akhir 2007 dan awal 2008 terhadap rumah tangga yang sama pada tahun 1993 dan keturunan mereka; 13.535 rumah tangga dan 44.103 individu diwawancara.

Pertanyaan seputar isu tenaga kerja dalam IFLS diikutsertakan dalam Buku 2 Modul UT dan NT dan Buku 3A Modul TK. Buku 2 mengumpulkan data tentang ekonomi rumah tangga termasuk modul UT yang berisi daftar kegiatan beternak rumah tangga dan modul NT yang berisi daftar kegiatan non-ternak rumah tangga. Di dalam NT, informasi mengenai usaha yang dijalankan oleh sebuah keluarga dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah keluarga itu bergerak di bidang ekonomi informal. Beberapa pertanyaan dalam modul ini yang dapat digunakan untuk menentukan informalitas antara lain modal awal dari perusahaan, apakah usaha itu memiliki izin, dan bentuk perizinan apa yang dimiliki usaha itu, jumlah pekerja yang diupah dan tidak diupah di sana.

Modul TK dalam Buku 3A dari informasi orang dewasa menanyakan secara mendalam tentang pengalaman pasar kerja responden saat ini maupun di masa lalu. Pekerjaan didefinisikan secara luas untuk mengikutsertakan sektor formal dan informal, kerja penuh maupun paruh waktu, dan pekerja musiman serta sepanjang tahun. Jenis pekerjaan, sektor, jenis pengusaha, jam kerja serta upah hingga pekerjaan ganda dicatat untuk semua yang dipekerjakan pada saat itu.

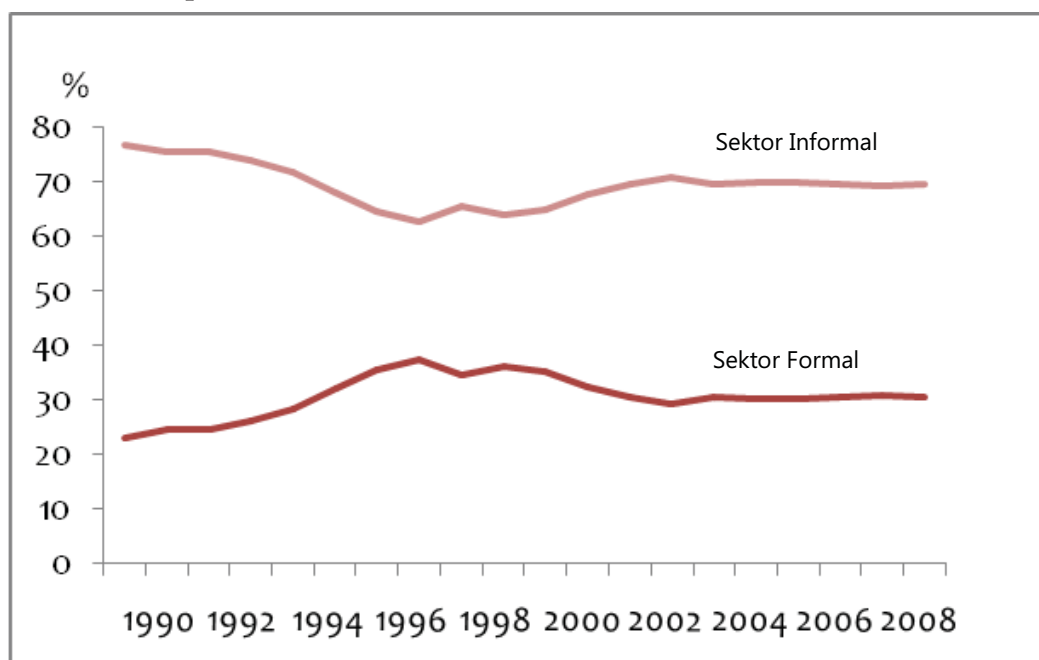
4. Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi

SAMA seperti di negara-negara berkembang lainnya, ada kecenderungan ekonomi informal mendominasi perekonomian di Indonesia. Tujuan keseluruhan dari pengurangan insiden informalitas ini telah menjadi tujuan bersama di kalangan pembuat kebijakan. Namun, seperti telah ditunjukkan dalam bagian sebelumnya, tidak ada definisi tunggal tentang apa yang dimaksud sebagai ekonomi informal. Memang, informalitas dalam ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pekerjaan maupun dari sudut pandang perusahaan. Bagian ini akan menjelaskan beberapa data statistik sehubungan dengan keberadaan ekonomi informal di Indonesia. Sebuah penilaian jangka panjang dari informalitas akan dijelaskan terlebih dulu.

4.1. Tren Jangka Panjang

Untuk menilai tren jangka panjang dari informalitas di Indonesia, kita perlu menggunakan definisi yang konsisten. Untuk tujuan ini, BPS telah secara konsisten menggunakan istilah pekerjaan menurut status, dan istilah itu juga akan digunakan di sini. Seperti didefinisikan sebelumnya, status 3 (pengusaha dengan pekerja permanen/pekerja upahan) dan status 4 (pegawai/staf/pekerja) dikategorikan sebagai pekerja formal, dan selebihnya adalah informal. Gambar di bawah menunjukkan tren dari proporsi sektor pekerjaan formal dan informal di Indonesia, dari tahun 1990-2009.

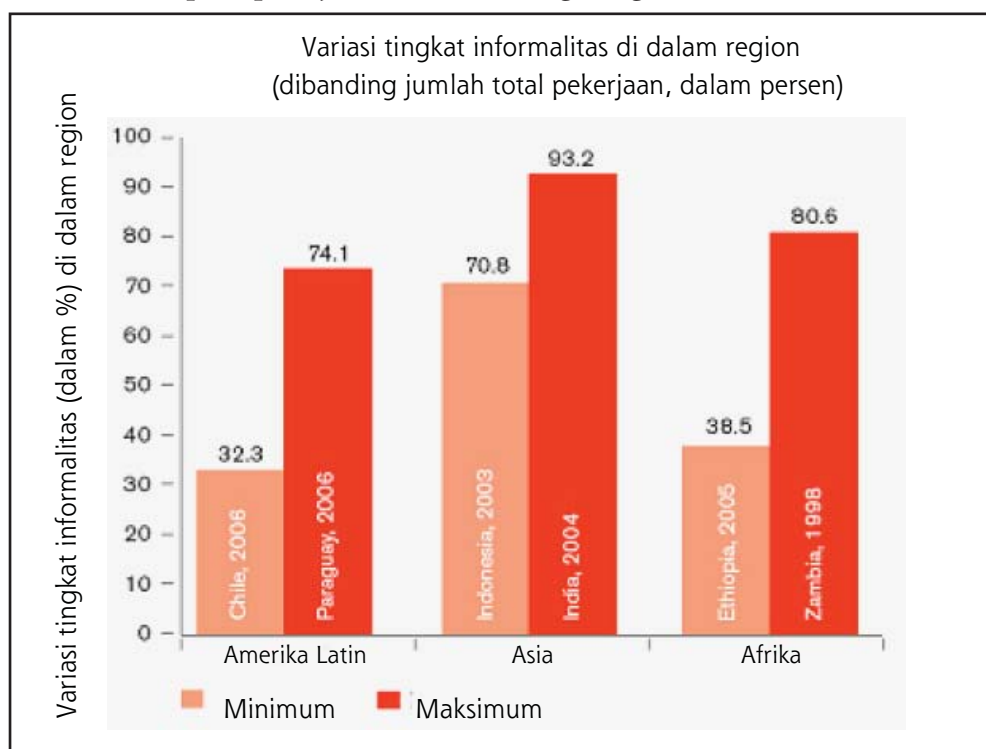
Gambar 2. Proporsi sektor formal dan informal Indonesia, 1990-2009



Gambar 2 benar-benar menunjukkan transformasi struktural dalam pasar kerja Indonesia, terutama dari sudut pandang status pekerjaan. Seperti terlihat dalam grafik, sebelum terjadinya krisis finansial tahun 1997, Indonesia berada dalam jalur yang nyata dengan menurunnya sektor informal dan meningkatnya sektor ketenagakerjaan formal. Namun, tren ini berbalik arah sebagai dampak dari krisis. Sebenarnya, sangat jelas hingga tahun 2003 ada tren balik dalam proporsi tenaga kerja formal dan informal. Dalam lima tahun terakhir, proporsi tersebut tetap sama. Penyerapan tenaga kerja dalam sektor formal meliputi sekitar 30 persen dari pekerja, di mana 70 persen lainnya masuk ke dalam ekonomi informal.

Mungkin kita bertanya: di manakah posisi Indonesia dibanding negara-negara berkembang lainnya di dunia dalam hal informalitas ekonomi? Sebagai perspektif, kita dapat melihat Gambar 3 di bawah yang memperlihatkan persentase pekerja informal, dibanding dengan jumlah total pekerjaan, dari berbagai negara di seluruh dunia.

Gambar 3. Proporsi pekerja informal di berbagai negara



Sumber: WTO dan ILO (2009), hal.29

Seperti terlihat dalam Gambar 3, variasi di antara negara sangat tajam. Persentase pekerja informal di Chile (pada 2006) hanya sekitar sepertiga dari jumlah total pekerjaan; sementara India (pada 2004) mencapai 93 persen. Namun kita harus berhati-hati, karena statistik mungkin tidak sama dari satu negara ke negara lainnya. Bagaimanapun, gambar di atas memberikan sekelumit keterangan tentang tingkat informalitas di negara-negara berkembang di dunia.

4.2. Pekerja Berdasarkan Status

Berdasarkan Sakernas, pada Februari 2009 terdapat 168,26 juta populasi berusia 15 tahun ke atas dengan 113,74 juta di antaranya aktif secara ekonomi, 104,48 juta bekerja dan 9,26 juta menganggur. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 67,60 persen sementara tingkat pengangguran mencapai 8,14 persen. Terkait dengan status pekerjaan, Tabel 4 di bawah ini menunjukkan jumlah pekerja berdasarkan status pekerjaan pada Februari 2009.

Tabel 4. Proporsi pekerja berdasarkan status pekerjaan, 2009

	Laki-laki	Perempuan	Desa	Kota	Total
Pekerja berusaha sendiri	20.2	19.5	17.3	23.7	19.9
Pengusaha dibantu oleh pekerja sementara/tidak dibayar	25.3	13.3	27.3	11.1	20.7
Pengusaha dibantu oleh pekerja permanen	3.8	1.3	2.0	4.1	2.8
Karyawan	30.0	23.9	16.1	44.4	27.7
Pekerja lepas dibidang pertanian	6.1	6.1	8.7	2.3	6.1
Pekerja lepas bidang di non-pertanian	6.5	2.5	4.4	5.8	4.9
Pekerja keluarga	8.2	33.4	24.2	8.7	17.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total jumlah pekerja (juta orang)	64.53	39.95	61.89	42.60	104.48

Sumber: BPS (2009)

Seperti yang bisa dilihat dari tabel, karyawan dan pengusaha dibantu oleh pekerja permanen merupakan 30,5 persen dari seluruh total pekerjaan. Jumlah ini sama dengan 72,6 juta dari total 104,48 juta pekerja. Itu adalah definisi tradisional dari sektor formal. Menggunakan definisi itu, sektor formal lebih banyak mempekerjakan pekerja laki-laki. Sektor formal juga diasosiasikan dengan daerah perkotaan (45,5 persen), yang berbeda cukup signifikan dari sektor formal di daerah pedesaan (24,8 persen).

Pekerja keluarga cukup tinggi di antara pekerja perempuan, sementara karyawan lepas di bidang non-pertanian lebih tinggi di banding laki-laki. Pekerja laki-laki juga mendominasi pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/tidak dibayar. Kita dapat mencatat dari tabel di atas bahwa pekerja keluarga, pekerja musiman di pertanian, pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/tidak dibayar merupakan fenomena pedesaan. Di sisi lain, pekerja berusaha sendiri cukup tinggi di daerah perkotaan.

4.3. Sektor Informal – Definisi yang Lebih Luas

Seperti telah diuraikan sebelumnya, kategorisasi status 3 dan 4 sebagai pekerja formal terlalu sederhana untuk menggambarkan dunia riil dari ekonomi informal dan kegiatan informal. Itu sebabnya BPS menghasilkan sebuah definisi baru dari kegiatan informal, dengan menyilangkan status dan tipe pekerjaan seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 2. Bagian ini akan menjelaskan data Indonesia menggunakan definisi tersebut, seperti yang telah dihitung BPS (2009).

Karena status tujuh kategori baru ditetapkan sejak 2001, maka Tabel 2 dapat dihitung per tahun untuk 2001-2009. Tabel 5 di bawah ini menunjukkan kondisi makro sektor informal di Indonesia, menggunakan definisi yang digambarkan oleh Tabel 2, untuk periode 2001-2009.

Jumlah keseluruhan pekerja informal di Indonesia meningkat dari 55,81 juta pada 2001 menjadi 64,84 juta di tahun 2009. Berarti terjadi peningkatan sebesar 16,2 persen untuk periode 2001-2009, lebih besar daripada pertumbuhan pekerja secara keseluruhan, yaitu sekitar 15,1 persen untuk periode yang sama. Hal ini semakin memperkuat gagasan informalisasi dalam pasar tenaga kerja. Patut diperhatikan, peningkatan tertinggi terjadi antara pekerja "berusaha sendiri" dan pekerja 'musiman' (baik di pertanian maupun non-pertanian).¹ Jumlah pekerja informal juga meningkat dari 61,5 persen pada 2001 menjadi 62,1 persen pada 2009. Ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan menjadi sekitar 64 persen pada 2003, sebelum turun pada 2009.

Tabel 5. Sektor informal Indonesia (juta pekerja), 2001-2009

	2001	2003	2006	2009
Informal - perkotaan	13.93	14.83	15.85	17.97
Informal - pedesaan	41.88	43.61	44.92	46.87
Informal laki - laki	33.07	37.05	38.48	38.56
Informal perempuan	22.74	21.40	22.29	26.28
Total informal	55.81	58.45	60.77	64.84
Total pekerja	90.81	90.78	95.18	104.49
Jumlah informal menggunakan definisi baru (% dari keseluruhan pekerja)	61.5	64.4	63.4	62.1
Jumlah informal dari definisi lama (% dari keseluruhan pekerja)	67.7	70.8	69.8	69.5

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pekerja informal Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Namun, sektor ekonomi informal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Antara tahun 2001 dan 2009, pekerja informal di pedesaan tumbuh sebesar 11,9 persen sementara pekerja informal di daerah perkotaan tumbuh tidak lebih dari 29 persen. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan untuk pekerja informal laki-laki (16,6 persen) relatif tidak terpaut jauh dengan pekerja informal perempuan (15,6 persen).

Sebuah pertanyaan yang mungkin muncul pada tahap ini adalah bagaimana definisi baru berbeda dari definisi lama yang digunakan di Gambar 2. Baris terakhir dari Tabel 5 menawarkan sebuah ilustrasi. Secara umum, kedua definisi tersebut berada di tingkat yang berbeda namun dengan kecenderungan yang serupa. Pembagian meningkat hingga 2003 sebelum turun secara teratur. Namun, besaran pekerja informal di tahun 2009 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2001.

¹ Peningkatan jumlah pekerja musiman pada tahun-tahun belakangan ini juga menjadi sorotan ILO (2009)

Tabel 6a. Kegiatan Informal, 2009

	Jenis pekerjaan								Total
	1	2	3	4	5	6	7/8/9	Lainnya	
Status									
1	432 643	14 520	381 103	7 474 687	1 139 285	4 829 410	6 538 652	-	20 810 300
2	69 555	109 243	29 409	4 475 659	329 438	14 773 617	1 849 840	-	21 636 761
3	82 932	329 145	49 588	811 738	172 963	715 767	806 348	-	2 968 481
4	4 177 891	549 345	4 279 902	2 637 556	3 398 340	2 177 17	11 131 579	561 334	28 913 118
5	291	-	908	1 137	6 319	6 295 912	41 555	-	6 346 122
6	41 768	1 408	23 720	246 749	520 478	8 974	4 308 439	-	5 151 536
7	14 656	-	190 865	3 262 713	211 010	1 3752 305	1 227 577	-	18 659 126
Total	4 819 736	1 003 661	4 955 495	18 910 239	5 777 833	4 2553 156	25 903 990	561 334	104 485 444

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)

Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.

Status pekerjaan:	Jenis pekerjaan:
1. Berusaha sendiri	1. Profesional, teknik dan terkait
2. Berusaha sendiri dibantu oleh keluarga/anggota tidak dibayar	2. Pekerja administratif dan manajerial
3. Pengusaha dengan pekerja permanen/pekerja diupah	3. Juru tulis dan pekerja terkait
4. Karyawan/staf/pekerja	4. Pekerja bidang penjualan
5. Pekerja musiman di bidang pertanian	5. Pekerja bidang jasa
6. Pekerja musiman di bidang non pertanian	6. Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu
7. Pekerja tidak dibayar	7. Produksi dan pekerja terkait
	8. Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan
	9. Buruh
	10. Lain-lain.

Tabel 6b. Kegiatan Informal, 2006

	Jenis pekerjaan								Total
	1	2	3	4	5	6	7/8/9	Lainnya	
Status									
1	136242	4688	46251	7069156	887336	4526666	5631322		18301661
2	22158	1765	36322	3566571	304001	15272336	1429831		20632984
3	37017	26533	32277	691649	124104	1011435	890754		2813769
4	3355968	216802	4060988	2388570	3283356	1877871	10399406	389984	25972945
5	-	-	-	-	-	5886366	-		5886366
6	40796	-	32275	200260	441677	-	3528052	1070	4244130
7	19859	-	30451	2339718	199528	13464576	1271115		17325247
Total	3612040	249788	4238564	16255924	5240002	42039250	23150480	391054	95177102

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)

Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.

Status pekerjaan:	Jenis pekerjaan:
1. Berusaha sendiri	1. Profesional, teknik dan terkait
2. Berusaha sendiri dibantu oleh keluarga/anggota tidak dibayar	2. Pekerja administratif dan manajerial
3. Pengusaha dengan pekerja permanen/pekerja diupah	3. Juru tulis dan pekerja terkait
4. Karyawan/staf/pekerja	4. Pekerja bidang penjualan
5. Pekerja musiman di bidang pertanian	5. Pekerja bidang jasa
6. Pekerja musiman di bidang non pertanian	6. Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu
7. Pekerja tidak dibayar	7. Produksi dan pekerja terkait
	8. Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan
	9. Buruh
	10. Lain-lain.

Tabel 6c. Kegiatan informal, 2003

	Jenis pekerjaan								Total
	1	2	3	4	5	6	7/8/9	Lainnya	
Status									
1	88 180	5 392	48 650	6 559 044	769 869	4 008 923	5 174 684	146	16 654 888
2	15 115	5 646	21 426	3 785 643	147 230	16 420 358	1 638 140	-	22 033 558
3	31 637	15 451	24 808	574 916	85 652	1 028 284	947 085	-	2 707 833
4	2 573 094	143 564	4 193 246	2 085 951	2 556 301	2 012 370	9 855 372	409 214	23 829 112
5	-	-	-	-	881	4 550 671	3 696	-	4 555 248
6	29 176	-	15 043	185 391	299 267	-	2 729 673	-	3 258 550
7	18 556	-	26 000	2 503 072	129 862	13 855 192	1 218 046	-	17 745 728
Total	2 755 758	170 053	4 329 173	15 694 017	3 989 062	41 875 798	21 561 696	409 360	90 784 917

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)

Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.

Status pekerjaan: - Berusaha sendiri - Berusaha sendiri dibantu oleh keluarga/anggota tidak dibayar - Pengusaha dengan pekerja permanen/pekerja diupah - Karyawan/staf/pekerja - Pekerja musiman di bidang pertanian - Pekerja musiman di bidang non pertanian - Pekerja tidak dibayar	Jenis pekerjaan: - Profesional, teknik dan terkait - Pekerja administratif dan manajerial - Juru tulis dan pekerja terkait - Pekerja bidang penjualan - Pekerja bidang jasa - Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu - Produksi dan pekerja terkait - Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan - Buruh - Lain-lain.
---	--

Tabel 6d. Kegiatan Informal, 2001

	Jenis pekerjaan								Total
	1	2	3	4	5	6	7/8/9	Lainnya	
Status									
1	97817	5260	44542	7109579	804797	4163106	5226603		17451704
2	27927	8606	26598	3598222	226389	14891107	1550224		20329073
3	27914	26282	28520	628554	69463	892181	1115964		2788878
4	2993203	194783	4123409	2009871	2959557	2712125	11191448	394604	26579000
5					1746	3627462	3918		3633126
6	38460		9296	112592	206002		2072685		2439035
7	22886	355	27048	2602842	151029	13310987	1471454		17586601
Total	3208207	235286	4259413	16061660	4418983	39596968	22632296	394604	90807417

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)

Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.

Status pekerjaan: - Berusaha sendiri - Berusaha sendiri dibantu oleh keluarga/anggota tidak dibayar - Pengusaha dengan pekerja permanen/pekerja diupah - Karyawan/staf/pekerja - Pekerja musiman di bidang pertanian - Pekerja musiman di bidang non pertanian - Pekerja tidak dibayar	Jenis pekerjaan: - Profesional, teknik dan terkait - Pekerja administratif dan manajerial - Juru tulis dan pekerja terkait - Pekerja bidang penjualan - Pekerja bidang jasa - Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu - Produksi dan pekerja terkait - Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan - Buruh - Lain-lain.
---	--

Tabel 6e. Kecenderungan kegiatan informal berdasarkan tipe pekerjaan (persen), 2006 dan 2009

	2006	2009
Pekerja profesional, teknik dan profesi terkait lainnya	0,50	0,3
Pekerja administratif dan manajerial	0,0	0,0
Pekerja juru tulis dan pekerjaan terkait	0,7	3,9
Pekerja bidang penjualan	59,1	58,1
Pekerja bidang jasa	29,2	32,5
Pekerja pertanian, peternakan, kehutanan serta nelayan dan pemburu	93,1	93,2
Pekerja produksi, transportasi dan buruh	45,1	46,8

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia

Tabel 6a hingga 6d memperlihatkan secara lebih rinci analisis informalitas dari pasar tenaga kerja Indonesia. Tabel 6e meringkas informasi dengan memperlihatkan jumlah pekerja informal berdasarkan jenis pekerjaan dan mengkaji tren yang terjadi antara 2006 dan 2009 – periode di mana perbandingan secara resmi dapat dilakukan. Menurut Tabel 6e, jumlah pekerja informal untuk “pekerja profesional, teknik dan profesi terkait lainnya” dan “pekerja bidang penjualan” terus menurun. Jumlah pekerja informal untuk “pekerja administratif dan manajerial” tidak jauh berbeda antara 2006 dan 2009. Untuk semua bentuk pekerjaan, jumlah pekerja informal meningkat terutama untuk “pekerja juru tulis dan pekerjaan terkait” dan “pekerja bidang jasa”.

Bagian berikut ini akan menekankan dimensi gender, kota-desa dan provinsi dari informalitas. Akan sangat baik apabila analisis dilakukan pada saat bersamaan pada periode 2001-2009 untuk dimensi-dimensi ini. Namun, BPS secara resmi memasukkan konsep pekerja informal–mengacu pada konsep yang digambarkan di Tabel 2–hanya setelah tahun 2005. Pada tahun ini pula BPS mempublikasikan Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, yang mencakup beberapa tabel rinci mengenai pekerja informal. Oleh karena itu, analisis yang lebih detail (terdiri dari desa-kota, laki-laki-perempuan dan dimensi provinsi) dalam bagian ini hanya dapat ditunjukkan untuk tahun 2005 dan 2009.

4.4. Informalitas dan Gender

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sektor informal juga melibatkan perempuan di dalamnya. Perempuan terlibat dalam ekonomi informal sebagai hasil dari peran mereka dalam merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Gallaway dan Bernasek (2002) menggunakan data IFLS 1993 menegaskan anggapan bahwa perempuan Indonesia yang bekerja di sektor informal adalah kaum perempuan yang tidak memiliki peluang lain, berpendidikan paling rendah dan berpenghasilan paling minim. Gallaway dan Bernasek (2002) juga menegaskan bahwa probabilitas tanggung jawab perempuan di rumah terlihat dari indikator memiliki seorang bayi yang secara signifikan meningkatkan probabilitas bahwa perempuan akan tinggal di rumah dan mengurangi kecenderungan untuk bekerja baik di sektor formal dan informal.

Mereka juga menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki tidak dipengaruhi oleh faktor adanya anak.

Dua angka di bawah ini menunjukkan kondisi situasi pekerja informal laki-laki dan perempuan pada bulan Februari 2009. Gambar 1 menunjukkan disagregasi berdasarkan sektor asal. Dua sektor memiliki pekerja informal perempuan lebih banyak dari pekerja laki-laki informal: (i) perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan sektor hotel; dan (2) industri manufaktur. Sebagian besar pekerja informal di Indonesia muncul karena de-industrialisasi yang telah mulai terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya sektor ini menjadi "rumah" bagi pekerja formal.

Sejak krisis menghantam lebih dari 10 tahun lalu, pangsa manufaktur di Indonesia belum kembali ke tingkat pra-krisis. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor manufaktur selalu di bawah nilai keseluruhan PDB, dan karenanya, menurunkan proporsi sektor tersebut dalam ekonomi. Penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur cenderung menurun, sementara penyerapan di bidang pertanian dan perdagangan cenderung meningkat. Di triwulan ketiga tahun 2009, pertumbuhan industri manufaktur hanya mencapai 1,3 persen, jauh lebih sedikit dibanding pertumbuhan PDB yaitu sebesar 4,2 persen. Dibandingkan dengan situasi sebelum krisis, pada tahun 1987-1996, industri manufaktur berkembang dengan capat hingga 12 persen, jauh di atas pertumbuhan PDB yang sedikit di bawah 7 persen.

Basri (2009) menyebutkan, ada lima pertanda terjadinya de-industrialisasi. Pertama, jumlah usaha manufaktur telah menyusut sehingga terdapat *net entry* negatif. Kedua, ada kecenderungan memburuknya persaingan. Ketiga, Indonesia telah mulai menjauh dari jaringan manufaktur regional dan global. Keempat, kredit ke sektor ini merosot cukup tajam. Kelima, sektor manufaktur menggunakan listrik lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

Sejumlah isu terkait secara langsung dengan lima pertanda tersebut. Skema desentralisasi yang baru, efektif sejak tahun 2001, telah menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Pemerintah daerah pun mencari pendapatan yang lebih tinggi melalui pajak daerah dan retribusi. Peraturan daerah juga mencakup izin usaha. Beberapa pemerintah daerah melihat perizinan ini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, dan tidak menyadari bahwa di saat bersamaan mereka memulai transaksi ekonomi berbiaya tinggi. Di sisi lain, aparat pemerintah setempat membayangkan pemerintahan dengan birokrasi berbelit tidak sesuai dengan hukum serta tuntutan lainnya. Isu lain terkait dengan iklim usaha di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan listrik. Pemasokan listrik lebih sulit untuk daerah di luar Jawa dan telah menghambat pertumbuhan sektor manufaktur pada dasawarsa terakhir ini.

Di saat yang sama, regulasi pasar tenaga kerja telah menjadi sumber perdebatan selama lebih dari setengah dasawarsa. Ini adalah elemen daya saing. Dan regulasi pasar tenaga kerja yang kaku, yang diterapkan oleh Indonesia saat ini dipercaya telah menghambat penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal. Sebagai akibatnya, ekonomi informal menggunakan ruang di mana ekonomi informal tidak dapat menunjukkan kinerjanya.

Tabel 7 menunjukkan pekerja laki-laki dan perempuan dalam kegiatan informal, ditabulasi silang dengan tingkat pendidikan dan sektor mereka. Mayoritas pekerja informal adalah laki-laki. Pada tahun 2009, terdapat 38,6 juta pekerja informal laki-laki dan 26,3 pekerja informal perempuan. Hampir dua pertiga pekerja informal hanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau kurang dari itu, dan ini terjadi pada laki-laki dan perempuan.

Tabel 7. Pekerja dalam sektor informal berdasarkan gender, sektor & pencapaian pendidikan , 2005 dan 2009

	2005		2009	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
TINGKAT PENDIDIKAN				
Tidak sekolah	2.214.647	2.709.360	2.118.781	3.013.307
Tidak lulus SD	5.562.912	4.704.493	6.074.921	4.922.555
SD	16.638.048	10.431.778	16.441.509	10.656.049
SMP	8.196.477	3.524.740	8.222.481	4.593.187
SMU	3.065.015	1.239.336	3.658.419	2.010.823
SMK	1.340.560	502.427	1.650.810	805.157
Akademi/diploma	116.195	86.942	179.429	150.480
Universitas	183.143	1.112.21	216.666	129.766
SEKTOR				
Pertanian	23.913.836	14.869.343	24.075.231	15.741.793
Industri manufaktur	1.030.394	1.750.880	1.684.197	2.137.387
Perdagangan, restoran dan hotel	4.748.953	5.544.953	4.948.543	6.854.252
Masyarakat, layanan sosial & personal	1.333.295	947.831	1.627.331	1.099.773
Lainnya	6.290.819	197.290	6.227.714	448.119

Sumber: BPS, Kondisi Angkatan Kerja 2005 dan 2009

Catatan: 'Sektor lain' mencakup pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, konstruksi, transportasi, penyimpanan, komunikasi, keuangan, asuransi, properti, dan layanan bisnis.

Terkait dengan klasifikasi sektoral, pertanian memiliki pekerja informal laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2009, sektor ini mencakup 60 persen dari total pekerja informal. Sektor lainnya yang juga muncul sebagai tempat bagi para pekerja informal adalah perdagangan, restoran dan hotel. Pekerja informal kemungkinan besar terkonsentrasi dalam sektor perdagangan.

Aspek yang menarik lainnya dalam analisis tenaga kerja laki-laki dan perempuan adalah upah. Tabel 8 di bawah ini menunjukkan kesenjangan dalam pendapatan laki-laki dan perempuan, baik dalam sektor formal dan informal. Kesenjangan tersebut terkait dengan jam kerja mingguan sehingga kita dapat melihat juga gaji rata-rata per jam.

Tabel 8. Gaji, jam kerja, dan gaji per jam 2006-2008

	2006	2007	2008
Gaji/upah bulanan rata-rata (rupiah)			
Laki-laki	827.101	958.971	1.031.348
Perempuan	612.131	715.414	773.979
Waktu kerja mingguan rata-rata (jam)			
Laki-laki	44	45	44
Perempuan	41	42	41
Gaji/upah rata-rata per jam (rupiah per jam)			
Laki-laki	18.798	21.310	23.440
Perempuan	14.930	17.034	18.878

Sumber: BPS (2009) hal. 112

Kesenjangan penghasilan di antara perempuan dan laki-laki sebagian dapat dijelaskan melalui produktivitas yang lebih rendah, keterlibatan dalam sektor informal, waktu kerja yang lebih sedikit dan sebagian lagi dapat dijelaskan sebagai sebuah diskriminasi terhadap perempuan. Kajian sebelumnya oleh Feridhanusetyawan, Aswicahyono, dan Perdana (2001) menunjukkan dengan menggunakan data Sakernas 1986 dan 1997 data, maka kesenjangan upah berdasarkan gender muncul di kedua tahun tersebut.

Kendati sektor informal umumnya dikenal sangat terkait dengan kemiskinan, terdapat beberapa kajian sistematis mengenai keterkaitan ini. Namun, satu kajian yang belum lama dilakukan Angelini dan Hirose (2004) menggunakan survei kecil yang mungkin dapat memberikan indikasi bahwa terdapat beberapa jumlah yang signifikan, hampir seperlima dari pekerja/karyawan yang terlibat dalam kegiatan informal mampu memperoleh pendapatan lebih dari rata-rata nasional. Ini mendorong orang untuk berpikir ulang mengenai peran dari ekonomi informal tidak hanya sebagai strategi penyangga, namun juga sebagai sebuah peluang untuk keluar dari kemiskinan. Namun, diperlukan sebuah kajian yang lebih sistematis dengan sampling yang dapat digeneralisir untuk mencapai kesimpulan ini.

Studi lain oleh Widarti (2006:31) memperlihatkan, sebagian besar usaha informal tidak mengetahui tentang peraturan upah minimum, dan tingkat upah dari pekerja di usaha informal beragam tergantung jenis pekerjaan, keterampilan dan macam kegiatan. Kendati menarik untuk dicatat bahwa variasi pendapat bisa jadi sangat beragam, perlu diingat bahwa informalitas tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Melainkan, dikaitkan dengan status dan tipe pekerjaan dari orang terkait.

4.5. Ekonomi Informal Desa - Kota

Seperti yang dicatat sebelumnya, ekonomi informal dapat dilihat sebagai sebuah fenomena kota serta desa. Lewis menekankan keberadaan sektor informal sebagai hasil dari kelebihan tenaga kerja di daerah pedesaan; sementara Harris-Todaro menyatakan sektor informal adalah sebuah fenomena urban yang berfungsi sebagai sebuah "ruang tunggu" untuk para migran desa-kota sembari mereka mengantre untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal kota yang lebih menguntungkan.

Tentu saja kedua dunia ini ada di Indonesia. Migrasi desa-kota terjadi seperti yang digambarkan model Harris-Todaro. Penyebaran pusat-pusat kota tidak hanya sebagai hasil dari daerah-daerah pusat bisnis yang semakin mahal namun hingga titik tertentu juga merupakan hasil dari perpindahan populasi dari daerah pedesaan. Dalam perspektif tersebut, mudah untuk melihat bahwa ekonomi informal mungkin menandakan pertumbuhan pusat-pusat kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, atau kota besar lainnya seperti Medan atau Makasar.

Di sisi lain, kelebihan tenaga kerja di daerah pedesaan masih cukup besar. Ini benar-benar menjadi sumber kegiatan ekonomi informal di daerah pedesaan. Kendati tidak ada yang meninggalkan daerah pedesaan ke kota, jumlah orang di daerah pedesaan tetap sangat besar. Selain itu, daerah pedesaan, termasuk ekonomi informal, menjadi sumber penolong selama periode kekacauan ekonomi. Hugo (2000) menunjukkan, ada gerakan kembali ke daerah pedesaan, selama krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Ini merupakan bagian dari mekanisme dalam menghadapi krisis. Daerah pedesaan selalu menawarkan biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan kota, dan masyarakat desa adalah tempat di mana sistem keluarga besar diakui secara luas.

Tabel 9. Pekerja di sektor formal oleh kota-desa, sektor & tingkat pendidikan, 2005 dan 2009

	2005		2009	
	Desa	Kota	Desa	Kota
TINGKAT PENDIDIKAN				
Tidak sekolah	4.180.675	743.332	4.440.422	691.666
Tidak lulus SD	8.160.084	2.107.321	8.848.116	2.149.360
SD	20.945.460	6.124.366	20.909.613	6.187.945
SMP	8.016.175	3.705.042	8.510.240	4.305.428
SMU	2.303.812	2.000.539	2.864.297	2.804.945
SMK	812.694	1.030.293	1.090.100	1.365.867
Akademi/diploma	69.517	133.620	119.476	210.433
Universitas	94.031	200.333	92.666	253.766
SEKTOR				
Pertanian	34.557.470	4.225.709	35.828.758	3.988.266
Industri manufaktur	1.646.816	1.134.158	1.862.938	1.958.646
Perdagangan, restoran dan hotel	4.336.687	5.957.219	4.792.471	7.010.324
Jasa	836.724	1.444.402	1.040.637	1.686.467
Lainnya	3.204.751	3.283.358	3.350.126	3.325.707

Sumber: BPS, Situasi Angkatan Kerja, 2005 dan 2009

Catatan: 'Sektor lain' mencakup pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, konstruksi, transportasi, penyimpanan, komunikasi, keuangan, asuransi, properti, dan layanan bisnis.

Tabel 9 menunjukkan pekerja dalam sektor informal berdasarkan kota-desa, sektor dan tingkat pendidikan di tahun 2005 dan 2009. Ekonomi informal adalah fenomena pedesaan di Indonesia. Tabel 5 sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2009, dari 64,8 juta pekerja di ekonomi informal, 46,87 juta pekerja (72,3 persen) bermukim di daerah pedesaan. Dari seluruh pekerja informal yang bermukim di daerah pedesaan tersebut, sekitar 34,2 juta (73 persen) hanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau lebih rendah

lagi. Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan, hanya sekitar 50 persen. Untuk yang berpendidikan tinggi, pekerja informal dengan ijazah SMA atau di atasnya di daerah pedesaan adalah sekitar 4,16 juta (8,9 persen dari total pekerja informal).

Hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa semakin tinggi pendidikan orang, mereka memilih untuk tinggal di daerah perkotaan. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka memilih tinggal di kota dan bekerja dalam kegiatan informal. Ketika orang yang berpendidikan tinggi memilih untuk memulai sebuah bisnis, mereka mungkin mengawalinya dengan bisnis informal. Pasar tenaga kerja yang ketat di daerah perkotaan menyebabkan sulitnya menemukan pekerjaan yang sesuai. Ekonomi informal kemudian menjadi tawaran yang cukup menarik, karena orang yang berpendidikan akan memiliki peluang yang lebih besar dan akses ke informasi yang lebih baik, dan karenanya lebih mampu untuk mendapatkan sewa dan profit, serta kemungkinan besar mampu mendapatkan penghasilan yang cukup besar dalam ekonomi informal.

Terdapat perbedaan yang cukup khas dalam penekanan sektoral pekerja informal di daerah desa dan kota. Daerah pedesaan ditandai dengan pekerja informal di bidang pertanian. Di sisi lain, di daerah perkotaan umumnya pekerja informal bekerja di bidang perdagangan, restoran dan hotel. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aktivitas informal di sektor perdagangan tersebut terpusat pada perdagangan dan disusul dengan restoran tertentu.

4.6. Kegiatan Informal Lintas Provinsi

Tabel 9 di bawah ini menunjukkan persentase pekerja informal terhadap jumlah keseluruhan pekerja di tiap provinsi di tahun 2005 dan 2009. Variasi persentase lintas provinsi cukup besar. Pada 2009, DKI Jakarta memiliki persentase paling rendah (26,2 persen), sementara Nusa Tenggara Timur tertinggi (83,3 persen). Sementara besaran pada tahun 2009 sedikit lebih rendah daripada tahun 2005, posisi relatif antar provinsi kurang lebih tetap sama. Fakta bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan proporsi pekerja informal terkecil kemungkinan dapat dikaitkan dengan status metropolitan. Jakarta adalah daerah pusat bisnis tidak hanya untuk daerah sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Sembilan dari sepuluh provinsi memiliki ekonomi informal lebih besar dari 50 persen.

Empat provinsi memiliki persentase pekerja informal di bawah 50 persen. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Banten. Ingat, Jakarta dan Banten sangat dekat dan berada dalam satu penataan kota. Kepulauan Riau sedang menuju menjadi kota metropolitan Batam. Sedangkan Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya minyak dengan populasi yang relatif sedikit.

Jumlah pekerja informal umumnya lebih tinggi untuk provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, dan provinsi di daerah timur lainnya. Kesemuanya berada di atas 70 persen, dengan pengecualian Kalimantan Timur. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah intensitas ekonomi informal memiliki relasi dengan kemiskinan. Tabel 9 juga menyajikan tingkat kemiskinan provinsi tahun 2009. Koefisien korelasi antara besaran pekerja informal dan tingkat kemiskinan di tahun 2009 ternyata cukup moderat ($\text{corr.} = 0.572$). Selain itu, juga harus disadari adanya relasi antara kemiskinan dan informalitas dalam pasar tenaga kerja. Keduanya dapat menciptakan sebuah lingkaran setan kemiskinan mengingat masyarakat miskin tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di sektor formal dan berakhir dalam kegiatan informal dengan tingkat gaji yang rendah tanpa perlindungan yang membuat mereka tetap miskin.

Tabel 10. Persentase pekerja informal terhadap total pekerja berdasarkan provinsi, 2005 dan 2009, dan tingkat kemiskinan 2009

Provinsi	Persentase pekerja informal		Tingkat kemiskinan
	2005	2009	2009
N. Aceh Darussalam	69.4	60.9	21.8
Sumatera Utara	64.8	63.0	11.51
Sumatera Barat	63.0	67.3	9.54
Riau	53.3	53.2	9.48
Jambi	65.6	63.9	8.77
Sumatera Selatan	76.6	69.8	16.28
Bengkulu	76.8	77.0	18.59
Lampung	77.9	72.3	20.22
Bangka Belitung	53.1	56.3	7.46
Kepulauan Riau	-	33.7	8.27
DKI Jakarta	26.6	26.4	3.62
Jawa Barat	57.0	56.9	11.96
Jawa Tengah	65.1	64.2	17.72
DI Yogyakarta	59.9	57.9	17.23
Jawa Timur	66.0	65.8	16.68
Banten	52.7	49.5	7.64
Bali	56.9	56.5	5.13
Nusa Tenggara Barat	73.5	72.2	22.78
Nusa Tenggara Timur	88.3	83.3	23.31
Kalimantan Barat	71.7	70.2	9.3
Kalimantan Tengah	76.5	68.5	7.02
Kalimantan Selatan	66.4	60.9	5.12
Kalimantan Timur	45.6	47.8	7.73
Sulawesi Utara	60.0	61.2	9.79
Sulawesi Tengah	77.3	70.7	18.98
Sulawesi Selatan	72.6	68.4	12.31
Sulawesi Tenggara	76.3	70.7	18.93
Gorontalo	71.1	71.0	25.01
Sulawesi barat	-	72.9	15.29
Maluku	71.2	73.7	28.23
Maluku utara	79.2	74.2	10.36
Papua Barat	-	61.4	35.71
Papua	79.8	82.4	37.53
Indonesia	63.9	62.1	

Sumber: BPS, Situasi Angkatan Kerja 2005 dan 2009

4.7. Perspektif Usaha

Besaran kegiatan informal dapat juga dianalisis dari perspektif usaha. Satu indikator yang dapat digunakan adalah jumlah usaha tanpa badan hukum. BPS menghasilkan data ini hingga pada tahun 2004, dari survei yang disebut sebagai Survei Usaha Terintegrasi (Susi), yang merupakan kelanjutan dari Sensus Ekonomi pada tahun 1996. Jumlah pembentukan usaha tanpa badan hukum antara 1996-2004 disajikan di Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah usaha tanpa badan hukum, 1996-2004 (dalam jutaan)

	1996	1998	2000	2002	2004
Pertambangan & penggalian, utiliti & konstruksi	0.357	0.237	0.249	0.256	0.257
Industri manufaktur	2.859	2.179	2.599	2.729	2.672
Perdagangan grosir & eceran, restoran & akomodasi	9.772	8.547	8.651	9.233	10.486
Transportasi dan komunikasi	1.834	1.595	1.855	1.927	2.307
Layanan keuangan, real estate, penyewaan	1.958	1.416	1.627	1.560	1.423
Total	16.781	13.974	14.980	15.704	17.145

Sumber: BPS, Survei Usaha Terintegrasi, baragam tahun

Terdapat tidak lebih dari 17,14 juta usaha tanpa badan hukum di Indonesia pada tahun 2004. Jumlah itu sedikit lebih tinggi daripada kondisi pra-krisis pada tahun 1996, ketika Indonesia memiliki sekitar 16.78 juta usaha tanpa badan hukum. Memang, jumlah usaha tanpa badan hukum sepertinya terkait positif dengan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pemulihan ekonomi, kegiatan informal juga meningkat.

5. Tantangan Mendatang Terkait Penurunan Sektor Informal di Indonesia: Sejumlah Permasalahan Kebijakan

KEGIATAN informal telah dikenal sebagai sebuah fenomena alami di banyak negara berkembang. Keterlibatan di dalam ekonomi informal juga diasosiasikan dengan upah yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan berbahaya, keamanan dan perlindungan yang lebih rendah serta banyak kerugian lainnya. Dengan kata lain, ekonomi informal mewakili sebuah kerja yang tidak layak. Di sisi lain, ekonomi informal adalah sumber mata pencaharian dan perlindungan segera dari kemiskinan. Dalam ekonomi tanpa manfaat bagi pengangguran, sektor informal menawarkan solusi cepat terhadap kebutuhan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan.

Tingginya keberadaan ekonomi informal dengan banyak kerugian dibandingkan dengan ekonomi formal dapat menjadi hambatan besar bagi negara-negara berkembang dalam memenuhi janjinya untuk mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) guna mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 50 persen di tiap negara peserta pada tahun 2015. Tujuan utama MDG diterjemahkan ke dalam delapan tujuan yang dibagi bersama oleh negara-negara tersebut, antara lain kemiskinan dan kelaparan, pendidikan universal, kesetaraan gender, kesehatan anak dan orangtua, memerangi HIV/AIDS, keberlanjutan lingkungan dan kemitraan global. Pada masing-masing tujuan, beberapa target dan indikator telah ditentukan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan. Masing-masing tujuan pun terkait satu sama lain mengingat kemiskinan adalah masalah multidimensi dan karenanya harus ditanggulangi secara bersamaan.

Selain itu, mencapai kondisi kerja yang layak untuk semua telah diakui sebagai salah satu cara untuk mempertahankan penurunan kemiskinan. Asia, khususnya dalam menentukan target untuk mencapai kerja yang layak untuk semua dalam satu dasawarsa yang dikenal sebagai Dasawarsa Pekerjaan yang Layak Asia (Asia Decent Work Decade/ADWD) 2006-2015. Tahun berakhir yang sama antara ADWD dan MDG serta tujuan pengentasan kemiskinan yang sama membuat pencapaian kedua tujuan ini tidak terpisahkan. Kegiatan informal dengan karakteristiknya yang kurang memadai akan secara langsung menghambat pencapaian target-target yang terkait pekerjaan yang layak untuk semua dalam MDG1 dan ADWD. Selain itu, ekonomi informal dengan beberapa karakteristiknya yang kurang menguntungkanpun dapat memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lainnya dari MDG.

Fakta bahwa kegiatan informal terkait dengan upah yang lebih rendah dan biasanya tidak mencapai upah minimum di Indonesia akan membuat rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan ini tidak dapat memenuhi kehidupan yang layak bagi mereka. Selain itu, kekurangan asupan gizi dan perawatan bagi orangtua, misalnya, dapat membuat anak-anak mudah jatuh sakit. Ketika pencari nafkah tidak bekerja

di sektor formal, mereka kemungkinan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Apabila jatuh sakit, dia pun kemungkinan tidak mendapatkan pertolongan secara tepat. Dalam kasus-kasus seperti ini, kegiatan informal dapat menjadi ancaman dalam mencapai MDG. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa informalitas tidak selalu identik dengan penghasilan yang rendah. Paparan sebelumnya menunjukkan, informalitas juga dapat diasosiasikan dengan pekerjaan profesional, manajerial atau juru tulis – meskipun mereka yang masuk dalam kategori ini tergolong kecil.

Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan kembali posisi negara terhadap kegiatan ekonomi informal. Dari sudut pandang tenaga kerja, hal terpenting tidak selalu berarti pengurangan jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan informal. Yang paling perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah program jaminan sosial. Selain status dan tipe pekerjaan, selama perlindungan sosial dapat mencapai semua pekerja dalam kegiatan ekonomi, maka ancaman negatif dari ekonomi informal terhadap pencapaian MDG dan ADWD dapat dikurangi.

Payung kebijakan untuk perlindungan sosial nasional diberikan oleh Undang-Undang No. 40/2004. Sayangnya, hampir tidak ada yang terjadi selama enam tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut. Di sisi lain, program pengentasan kemiskinan yang ada memprioritaskan beberapa layanan penting yang mungkin signifikan bagi sektor informal.

Saat ini, program pengentasan kemiskinan dijelaskan secara lengkap dalam Peraturan Presiden No. 13/2009. Program ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah bantuan sosial berbasis rumah tangga. Di bawah kelompok pertama ini, bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin dalam bentuk subsidi beras, layanan kesehatan, beasiswa sekolah, bantuan tunai langsung dan bantuan tunai bersyarat. Program-program ini ditargetkan untuk kaum miskin termasuk pengangguran, orang yang bekerja di sektor formal dan informal. Kedua adalah program pemberdayaan masyarakat. Bantuan dana didistribusikan ke masyarakat dan mereka yang memutuskan penggunaan dana tersebut. Masyarakat dapat memutuskan untuk meningkatkan infrastruktur seperti jalan, air dan fasilitas sanitasi. Kelompok ketiga adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pemerintah menyediakan jaminan untuk mendukung kredit usaha kecil dan mikro.

Kelompok pertama harus menjadi basis dari perlindungan sosial di Indonesia. Merujuk kepada Peraturan Presiden No. 13/2009, program tersebut diprakarsai pertama dengan rumah tangga miskin. Memang, rumah tangga ini sangat dekat dengan ekonomi informal. Oleh karena itu, penerapan yang serius dari kelompok pertama akan menghalangi efek negatif ekonomi informal dalam mencapai MDG dan ADWD. Kelompok kedua juga amat penting untuk memastikan peningkatan produktivitas di antara rumah tangga miskin. Tentunya kelompok ini sekali lagi sangat dekat dengan kegiatan informal. Perbaikan infrastruktur pedesaan atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya di bawah kelompok kedua kemungkinan besar mempengaruhi ekonomi informal. Pada intinya, penting bagi program pengentasan kemiskinan, khususnya yang berada di bawah kelompok pertama dan kedua, diterapkan secara menyeluruh.

Tantangan lainnya terhadap ekonomi informal datang dari fakta bahwa Indonesia semakin dekat dengan ekonomi dunia. Krisis keuangan global baru-baru ini telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kebal terhadap apa yang terjadi di negara maju. Penurunan permintaan global memengaruhi perusahaan dalam negeri untuk mengurangi input, termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut kemungkinan besar akan berakhir dalam ekonomi informal. Walaupun meningkatkan informalitas tidak selalu berarti buruk dan tidak terhindarkan, pergerakan ke arah formalisasi ekonomi senantiasa diharapkan dan menjadi tujuan pembangunan utama.

Perangkat pertama untuk mengurangi sektor informal adalah pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel guna memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan karyawan secara formal. Peraturan memainkan peranan penting dalam memastikan memadainya fleksibilitas tersebut yang juga memastikan perlindungan yang cukup bagi pekerja. Kedua adalah strategi industrialisasi harus diciptakan ulang. Industri manufaktur akan membuka peluang terciptanya lapangan kerja. Kebijakan makro ekonomi dan stabilitas politik yang baik adalah kondisi penting untuk meningkatkan investasi. Meski penting, prosedur peraturan dan perizinan tidak boleh menghalangi inovasi.

Referensi

- Angelini, John and Kenichi Hirose (2004). *Extension of Social Security Coverage for the Informal Economy in Indonesia*. ILO Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Working Paper No. 11. ILO: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2009). Sensus Ekonomi 2006. Analisis Ketenagakerjaan. (Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja). BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (tahun-tahun sebelumnya). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.
- Basri, Faisal. (2009). Deindustrialisasi. *Tempo* Ed. 30 November-6 Desember 2009 pp. 102-103.
- Blunck, Niels-Hugo, Sudharshan Canagarajah, and Dhushyanth Raju (2001). *The Informal Sector Revisited: A Synthesis Across Space and Time*. Social Protection Discussion Paper Series, World Bank, July 2001.
- Brata, Aloysius Gunadi. (2007). *Spatial Concentration of Small and Cottage Industry in Indonesia*. available at: http://mpira.ub.uni-muenchen.de/12622/1/MPRA_paper_12622.pdf.
- Chowdury, MD Hedayat Ullah (2005) *Informal Economy, Governance and Corruption*, *Philippines Journal of Development* no.60 second semester 2005, vol XXXII no.2
- Feridhanusetyawan Tubagus, Haryo Aswicahyono, and Ari A. Perdana. (2001). *The Male-Female Wage Differentials in Indonesia*. CSIS WORKING PAPER SERIES 059, CSIS: Jakarta
- Gallaway, Julie H. and Alexandra Bernasek (2002). *Gender and Informal Sector Employment in Indonesia*. *Journal of Economic Issues*, Vol. 36, No. 2 pp. 313-321.
- GTZ and Bappenas (2008). *Options for Social Protection Reform in Indonesia*. GTZ and Bappenas: Jakarta.
- Hugo, Graeme (2000). *The Impact of the Crisis on Internal Population Movement in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36, issue 2, August 2000, pp. 115-138.
- Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2009 Pemulihan dan langkah-langkah selanjutnya melalui pekerjaan yang layak, ILO Jakarta, 2009.
- Widarti, Diah (2006). Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah Di Sektor Informal Di Indonesia. ILO Jakarta, March 2006.